

KUOTA 1.000 LEBIH

Pemkab Usulkan 400 Pegawai PPK

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) mengusulkan sebanyak 400 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini. Menurut Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar rekrutmen pegawai tersebut untuk lingkungan pemerintah kabupaten.

Sebenarnya tahun ini Gunungkidul mendapatkan kuota lebih dari 1.000 formasi untuk PPPK, namun hanya mengusulkan sekitar 400 formasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ke 400 PPPK tersebut fokus untuk memenuhi kebutuhan pegawai di sektor kesehatan dan pendidikan. "Untuk tahun ini tidak ada perekrutan CASN," katanya, Rabu (7/6). Dijelaskan, alasan tidak memaksimalkan se-

suai kuota PPPK yang ada lantaran berbagai pertimbangan. Salah satunya karena jumlah yang diusulkan sesuai dengan jumlah ASN yang pensiun tahun ini. Selain itu juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah terkait dengan pembayaran gaji yang masih dibebankan ke APBD Kabupaten.

"Usukan yang diajukan itu menyesuaikan de-

ngan kemampuan APBD Kabupaten Gunungkidul," ujarnya.

Adapun rekrutmen sebanyak 400 PPPK tersebut juga sudah sesuai dengan jumlah ASN yang memasuki pensiun. Sehingga nantinya diharapkan bisa mengganti para pegawai yang berstatus ASN ini karena memasuki purna tugas.

Sedangkan terkait dengan jumlah kuota men-

capai 1.000 PPPK akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Terpisah Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto, mengatakan selama ini rekrutmen PPPK di sektor pendidikan hanya berfokus pada pemenuhan guru. Dengan demikian ia berharap agar rekrutmen PPPK di sektor pen-

didikan bisa diperluas untuk formasi lainnya.

Menurutnya, saat ini masih banyak tenaga honorer selain guru yang statusnya tidak tetap dan perlu diakomodir melalui rekrutmen PPPK tersebut.

"Misalnya seperti petugas administrasi, penjaga sekolah, ataupun operator sekolah yang statusnya tidak tetap," tutupnya. (Bmp)

Kuota Transmigrasi 2023 Sangat Minim

WATES (KR) - Kabupaten Kulonprogo pada 2023 berpotensi tidak kebagian kuota transmigrasi. Lantaran kuota transmigrasi tahun ini yang dialokasikan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya tujuh Kartu Keluarga (KK). Padahal minat masyarakat di lima kabupaten/ kota se-DIY untuk mengikuti program transmigrasi dinilai cukup tinggi.

"Pada 2023, DIY mendapatkan kuota transmigrasi hanya tujuh KK. Kemungkinan lima kabupaten/ kota masing-masing dapat satu KK sehingga tersisa dua KK. Ada kemungkinan juga daerah yang tidak dapat kuota kalau minat daerah lain lebih dari satu KK," kata Kabid Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo, Heri Widada, Rabu (7/6).

Dengan minimnya kuota transmigrasi tersebut maka Disnakertrans DIY belum membagi tujuh kuota untuk lima kabupaten/kota. Padahal dulu satu provinsi bisa dapat kuota transmigrasi berkisar 50-70 KK.

"Kami realistis saja. Jika tidak mendapatkan kuota transmigrasi sudah paham dengan kondisi wilayah tujuan transmigrasi. Karena lokasi transmigrasi yang diberikan pemerintah pusat ada yang tidak diminati warga," jelasnya menambahkan tahun sebelumnya lokasi transmigrasi di Mamuju, Sulawesi Barat dan Mahalona, Sulawesi Selatan serta Muna, Sulawesi Tengah. (Rul)

Anjar, Ketua AMPG Kapanewon Ponjong



KR-Dedy EW

Pelantikan AMPG Ponjong.

WONOSARI (KR) - Anjar Riyono dilantik menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kapanewon Ponjong di Grha GPC Ponjong belum lama ini. Sedangkan sekretaris dijabat Marsono dan Bendahara Suprihatin. Untuk ketua Satgas dijabat Robani. "Keberadaan AMPG harus bisa memberikan

karya nyata di masyarakat. Bisa melakukan koordinasi dan mampu memberikan peran serta di Gunungkidul," kata Ketua Pengurus Kapanewon Ponjong Supriyono ketika melantik AMPG Ponjong. Kegiatan dihadiri Ketua AMPG DIY Syarif Guska Laksana SH, Pengurus DPD Golkar DIY Erwin Nizar. Dalam sambutan-

nya Syarif Guska Laksana menyatakan, kehadiran AMPG sebagai pemuda Partai Golkar merupakan tekad untuk berada dalam kehidupan kepemudaan dan masyarakat Indonesia. Guna merealisasikan misi perjuangan Partai Golkar dalam mewujudkan kemajuan dan kemashlahatan seluruh rakyat Indonesia. "Juga untuk mendukung tercapainya visi partai Golkar," imbuhnya.

Syarief Guska Laksana SH menambahkan, AMPG harus bisa sukses dalam kaderisasi, memperluas basis partai untuk membentuk sebanyak-banyaknya kader baru. Sebagai sistem pengkaderan. AMPG sebagai organisasi sayap kepemudaan unta mampu menciptakan konstituen baru dengan penggalangan secara aktif terhadap para generasi muda. (Ded)

TERTUA USIA 88 TAHUN

Bupati Lepas 407 Jemaah Haji



KR-Bambang Purwanto

Bupati Gunungkidul melepas jemaah haji di Wonosari.

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul melepas jemaah haji sebanyak 407 jemaah di Masjid Al Ikhlas, Rabu (7/6) dinihari. Ke 407 jemaah tersebut tergabung dalam Kloter SOC 47 berjumlah 353 jemaah, kloter SOC 49 sebanyak 46 dan kloter 56 sebanyak 6 jemaah serta kloter tambahan sebanyak 2 jemaah.

Dari sebanyak 407 jemaah diketahui jemaah bernama Siem Ahmad Ngalm asal Kalurahan Ngunut Kapanewon Playen menjadi jemaah tertua dengan usia 88 tahun dan termuda Anandari Mistakul Jannah dengan usia 23 tahun berasal dari Kapanewon Playen dalam tahun Haji 1444H/2023.

Tangis haru mengiringi keberangkatan para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji selama 42 hari di Makkah dan Madinah diberang-

katkan dari Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (7/6) sore.

Bupati Gunungkidul H Sunaryanto dalam sambutannya mengatakan, menjadi sebuah kehormatan dan panggilan suci untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima untuk menunaikan ibadah haji.

Bupati juga berharap jemaah haji sebanyak 407 jemaah ini berangkat dan dapat kembali bertemu dengan keluarga dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dengan demikian dalam pelaksanaan seluruh jemaah haji asal Kabupaten menjadi jemaah haji yang istikhomah dan mandiri.

"Kami berharao pelaksanaan lancar dan kembali dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur," pintanya (Bmp/Ewi)

DIPROYEKSIKAN TANAM 5.000 HEKTARE Gunungkidul Jadi Lumbung Kedelai Pulau Jawa



KR-Endar Widodo

Penerima bantuan bersama Mentan dan Bupati Gunungkidul di Candirejo.

WONOSARI (KR) - Kabupaten Gunungkidul sangat potensial untuk pengembangan tanaman kedelai. Oleh sebab itu Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mengembangkan tanaman kedelai di kabupaten terluas di DIY ini. Mengawali program pengembangan kedelai tersebut Kementerian Pertanian membantu benih dan fasilitas lain untuk penanaman 1.000 hektare di Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin.

Pencanangan gerakan penanaman kedelai ini di-

lakukan Menteri Pertanian RI Prof Dr. Syahrul Yasin Limpo di sebuah lahan di Candirejo. Hadir dalam acara tersebut Bupati Gunungkidul H Sunaryanto, Forkompimda dan sejumlah tamu undangan lainnya.

"Ke depan daerah ini diproyeksikan penanaman kedelai seluas 5.000 hektare agar Kabupaten Gunungkidul menjadi lumbung kedelainya pulau Jawa," kata Menteri Pertanian RI Prof Dr. Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya.

Perluasan lahan tanaman kedelai di Gunungkidul diharapkan dapat menambah produksi nasional, sekaligus untuk menekan impor kedelai yang saat ini masih diatas 90 persen dari kebutuhan. Dalam arahnya Menteri Pertanian mengajak petani mengembangkan tanaman kedelai, serta mencari varietas unggul yang sesuai dengan kondisi alam. Agar harga jual kedelai meningkat untuk memotivasi petani lebih bersemangat dan masif menanam tanaman kedelai.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Ir Raharjo Yuwono MM mengungkapkan, luas tanam kedelai gunungkidul 4.397 hektare merupakan kebele bantuan pemerintah, salah satunya di musim tanam 3 diserahkan bantuan untuk tanaman kedelai 1000 hektare. Produksi total dalam setahun dengan 1,25 ton tiap hektare hasilnya mencapai 5.496 ton.

Untuk terus memperluas tanaman kedelai, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan bantuan pemerintah hampir Rp 8 miliar dari total DIY Rp 10,5 miliar. Antara lain bantuan berupa benih seluas 4.397 hektar senilai Rp 4.177.150.000, Pupuk NPK Rp 2.418.350.000,- Pesticida Rp 395.730.000, Pupuk hayati cair Rp 857.415.000, Traktor rotari 3 unit Rp. 114.537.000,- Pompa air 2 unit Rp 13.860.000. Alat tanam 10 unit Rp 15.000.000 dan Hand sprayer 5 unit Rp. 5.000.000. "Tahun ini jumlah bantuan Rp. 7.997.042.000," tambahnya. (Ewi/Bmp)

JUMLAH KASUS DINILAI TINGGI

DPRD Minta Pemkab Tangani Pernikahan Dini

WONOSARI (KR) - Kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul menjadi keprihatinan banyak pihak. Termasuk dari kalangan DPRD Gunungkidul Anggota Komisi D DPRD Ery Agustini berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serius menangani fenomena pernikahan dini di masyarakat. Pasalnya jumlah kasus yang terjadi hampir setiap tahun terbilang tinggi. Hal itu terlihat dari pengajuan dispensasi nikah yang selalubanyak diajukan masyarakat. "Kami berharap Pemkab mengambil langkah antisipasi," katanya, Selasa (6/6).

Menurutnya, jika tidak segera diantisipasi, pernikahan dini bisa menjadi bom waktu bagi Kabupaten Gunungkidul. Sebab ke depannya

akan memicu banyak permasalahan, seperti kemiskinan, masalah kesehatan berpotensi muncul lantaran kondisi biologis pasangan yang belum siap menikah. Seperti potensi terjadinya stunting hingga penyakit kanker serviks. Saat ini Pemkab Gunungkidul harus mengedepankan langkah edukasi ke masyarakat sebagai tinskan antisipasi kepada remaja agar bisa menjaga pergaulan secara sehat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul, dr Dewi Irawaty MKes membenarkan bahwa salah satu dampak terjafnyapernikahan dini bisa memicu sejumlah masalah kesehatan diantaranya kasus stunting. Dari data Dinkes yang dimiliki tahun 2022 kasus stunting mencapai 15,37 persen. Pihaknya berupa-

ya agar stunting bisa ditekan hingga di bawah rata-rata nasional, alias di bawah 14 persen. Upaya pencegahan tersebut terus dilakukan dan perlu dukungan banyak pihak. "Penanganan harus dilakukan secara terpadu," ujarnya.

Terpisah Panitera Muda Pengadilan Agama Wonosari, Khoiril Basyar mengatakan untuk pengajuan dispensasi nikah selama Januari-April juga mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Sampai saat ini sudah terdapat sebanyak 52 pengajuan dispensasi nikah. Jumlah paling banyak pada bulan Januari lalu mencapai 19 pemohon. "Dibanding dengang periode yang sama tahun 2022 meningkat 6,12 persen atau sebanyak 3 perkara," terangnya. (Bmp)

Potensi Zakat Besar, Realisasi Masih Minim

WATES (KR) - Potensi zakat sangat besar, tetapi dalam realisasinya masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh minimnya tingkat literasi dan kepercayaan masyarakat. Karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan zakat, yaitu efektif dan efisien, peningkatan kesejahteraan, serta penanggulangan kemiskinan, Kanwil Kemenag DIY menggelar sosialisasi pemetaan program pemberdayaan zakat.

"Saat ini lembaga pengelola zakat, baik Baznas maupun LAZ sudah sangat maju perkembangannya. Namun tingkat literasi masih minim dan kepercayaan masyarakat. Banyak muzaki yang lebih suka menyalurkan zakatnya langsung ke mustahik. Meskipun demikian, kami bangga dan sangat mengapresiasi hasil pengumpulan zakat dari Baznas Kulonprogo yang mencapai Rp 12,2 miliar dan tertinggi di DIY, kata Analis Kebijakan Bidang Penaizawa Kanwil Kemenag DIY, H Misbahrudin pada Sosialisasi Pemetaan Program Pemberdayaan Zakat yang berlangsung di MAN 2 Kulonprogo, Rabu (7/6).



KR-Widiastuti

Pelaksanaan sosialisasi pemetaan program pemberdayaan zakat.

Disampaikan, Baznas dan LAZ mempunyai tugas yang sama. Adanya pemetaan agar nantinya pengelolaan zakat dapat sesuai syaria dan regulasi. "Nantinya pemetaan ini akan dikordinir oleh Kemenag selaku pemangku kebijakan, Baznas dan LAZ sebagai operator kebijakan, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dengan sasaran kewilayahan dan penerima manfaat," ujarnya

Sementara itu, Penyelenggara Zakat Wakaf Kankemenag Kulonprogo, Haris Widiyanto SH menuturkan bahwa sosialisasi tersebut menghadirkan Lembaga Pengelola Zakat yang meliputi Baznas, LazisMu, LazisNU, dan Agen Sedekah. "Selain itu juga hadir DMI, BWI, Badko TKA/TPA, Pokjaluh, Pokjahulu, dan Dharma Wanita Perusatn Kankemenag Kulonprogo," ucap Haris. (Wid)